BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tahun 2015 pemerintah telah menerapkan penggunaan basis akrual untuk laporan akuntansi keuangan daerah. Penggunaan basis akrual ini di dasarkan atas beberapa pertimbangan bahwa dengan basis akrual dapat memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap daripada basis lainnya. Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK 05/2013 menerangkan bahwa setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan sudah menerapkan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan.

Di era globalisasi ini laporan keuangan yang berkualitas harus memiliki *high quality landing* baik itu dari sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, teknologi informasi maupun sistem pengendalian intern. Pemerintahan yang baik adalah yang mampu mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Tidak hanya kontribusi dari pusat namun juga wilayah. Peran dari keduanya sangat penting dalam mewujudkan tujuan bangsa dengan menerapkan dan mengupayakan laporan keuangan yang berkualitas.

Fakta laporan keuangan menunjukkan bahwa situasi pemerintah daerah di Indonesia terkhusus keuangan saat ini cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut. Terutama Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas yang dalam hal ini selalu mendapatkan WDP dari Tahun 2018-2023. Namun, karena kurangnya pemahaman terkait dengan Sistem Informasi Akuntansi pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) khususnya bagian keuangan ini yang menjadikan saya tertarik untuk mengkaji dan menganalisis.

Pasalnya hasil wawancara dari pihak Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK TW) menyebutkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah cukup rendah, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan itu harus mencakup informasi yang berkualitas dan akurat sesuai dengan yang dibutuhkan. Dalam sebuah instansi pemerintah penyusunan serta pengelolaan anggaran sangat penting, karena anggaran mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah yang berbasis moneter (rupiah). Dimana setiap pengguna anggaran harus mempertanggungjawabkan mata uang yang digunakan.

Selain itu, pemerintah harus membuat laporan keuangan sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan program kerja selama periode kepemimpinan.

Menurut PSAK No. 1 (2015 :1) *"Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas."* Dalam peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila relevan, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Ketika kriteria tersebut diterapkan dalam laporan keuangan, maka pemerintah daerah akan mendapat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan perusahaan dapat dicapai melalui penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan perusahaan yang mematuhi standar akuntansi yang ada serta tepat waktu.

Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan
yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur (Wijayanti : 2017). Syarat terpenuhinya laporan keuangan yang dilaporkan oleh pihak daerah sudah berkualitas salah satunya dengan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Pada tahun 2019-2021 Kabupaten Banyumas mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK-RI dengan melihat LKPD Kabupaten Banyumas.

Menurut Yuliani dan Agustini (2016) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu : Faktor yang pertama adalah Sistem Informasi Akuntansi (SIA). SIA sendiri muncul sebagai akibat semakin meningkatnya globalisasi kehidupan dalam masyaraakat. Ketika persaingan bisnis semakin meningkat, begitu juga barang dan jasa yang ditawarkan, serta kesadaran konsumen yang tidak lagi memungkinkan menggunakan sistem manual. Dalam proses pengelolaan keuangan daerah, pemerintah Indonesia telah menerapkan Peraturan Pemerintah RI No. 56 tahun 2005 tentang SIAKD (Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah) dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Zulfah dkk (2017) laporan keuangan yang relevan, transparan, dan dapat dipercaya dapat dihasilkan dengan pembentukan sistem informasi yang tepat oleh pemerintah daaerah. Dengan begitu, seiring dengan peningkatan sistem informasi akuntansi tersebut, maka laporan keuangan juga akan meningkat secara kualitas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Resi Intan Penatasari, dkk

(2019) dengan judul *"Dinamika Penelitian Sistem Informasi Akuntansi di Indonesia"* hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan dalam penelitian Siti Hasanah dan Tapi Rumondhang Sari Siregar (2021) dengan judul *"Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD di Kabupaten Labuhanbatu"* hasil penelitian menunnjukan bahwa Sistem Informasi Akuntansi (SIA) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Teknologi Informasi (TI). TI merupakan jenis teknologi yang digunakan untuk membuat, menyimpan, mengelola dan menggunakan data dalam segala bentuk apapun. Berkembangnya TI secara bertahap akan memudahkan seseorang dalam melakukan aktivitas dan pekerjaan. Menurut Komasari (2016) kapasitas yang belum memadai belum tentu menghasilkan laporan keuangan yang andal jika belum didukung TI. TI bermanfaat dalam proses identifikasi dan juga fluktuasi transaksi ekonomi dari wilayah tertentu, serta digunakan sebagai informasi dalam pengembangan kebijakan ekonomi. Dengan TI yang terus berkembang akan membantu dalam proses pembuatan dan sertifikasi laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Chodijah dan Nurul Hidayah (2018) dengan judul *"Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sitem Pengendalian Internnal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus SKPD Provinsi DKI Jakarta"* hasil penelitian menunjukkan bahwa Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Khoirina Kencana Ningrum dengan judul *"Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen"* ditunjukan bahwa Teknologi Informasi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah adanya sistem pengendalian intern. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang intergral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Wayan Tiya Lestari dan Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi (2020) dengan judul *"Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan"* hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ni Komang Ayu Mahartini, Anik Yuesti, dan I Made Sudiartana dengan judul *"Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern, dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Karangasem"* hasil penelitian menunjukan bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor keempat yang mempengaruhi kualiats laporan keuangan adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Kompetensi SDM dapat berdampak negatif pada kualitas laporan keuangan. SDM yang diharapkan adalah yang mampu menganalisis laporan keuangan berdasarkan standar dan memahami implikasi akuntansi pemerintahan, baik dalam hal keuangan daerah maupun operasional pemerintah atau bahkan organisasi yang terkait dengan pemerintah. Karena SDM yang berkompeten dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Karsana dan I Gusti Ngurah Agung Suaryana (2017) dengan judul *"Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan"* hasil penelitian menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Fauzi Isnaen dan Fauzan Akbar Albastiah (2021) dengan judul *"Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern terhadapp Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Wilayah Jakarta Barat"* hasil penelitian menunjukan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banyumas pada Tahun 2018-2023 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan BPK-RI. Dasar hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tercantum dalam UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006, tepatnya pada pasal 3 ayat 2 yang menyebutkan bahwa *"BPK memiliki perwakilan di setiap Provinsi."*

Tabel 1. 1
Opini Audit BPK-RI Pada LHP LKPD BPK Jawa Tengah 2018-2023

No	Opini Audit BPK-RI	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	35	36	36	36	35	36
2	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	1	-	-	-	1	-
3	Tidak Wajar (TW)	-	-	-	-	-	-
4	Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)	-	-	-	-	-	-

Sumber : annual report LHP LKPD BPK-RI

Tabel 1. 2 Opini Audit LHP LKPD BPK Jawa Tengah pada Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023

No	Judul Pemeriksaan	Nomor LHP	Tanggal LHP	Opini
1	LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018	55/LHP/XVIII.SMG/05/2019	22 Mei 2019	WTP
2	LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2019	99/LHP/XVIII.SMG/05/2020	15 Mei 2020	WTP
3	LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2020	66/LHP/XVIII.SMG/05/2021	20 Mei 2021	WTP
4	LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2021	71/LHP/XVIII.SMG/05/2022	24 Mei 2022	WTP

5	LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2022	45/LHP/XVIII.SMG/05/2023	08 Mei 2023	WTP
6	LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023	55/LHP/XVIII.SMG/05/2024	15 Mei 2024	WTP

Sumber : annual report LHP LKPD BPK Provinsi Jawa Tengah

Fenomena yang terjadi menurut hasil dari pemeriksaan BPK-RI diungkapkan oleh anggota V BPK RI Isma Yatun dalam sambutannya mengatakan bahwa "upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah telah dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel, dan juga memberi manfaat lebih, baik bagi pemangku kepentingan, para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Efektivitas SIA dan TI merupakan tekonologi yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangaan. Disisi lain penguatan sistem pengendalian intern dan kompetensi SDM dilakukan bukan tanpa tujuan. Salah satu kunci keberhasilan dalam kualitas laporan keuangan adalah digunakannya SDM yang berkompeten serta sistem pengendalian intern sesuai dengan bidang dan pemanfaatan teknologi informasi yang tepat.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya adalah dalam variabel objek penelitiannya. Alasan mengapa studi kasus peneliti adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas, karena di Banyumas sendiri belum banyak yang meneliti terkait kualitas laporan keuangan yang dipengaruhi oleh Efektivtas Sistem Informasi Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui seberapa baik sistem informasi akuntansi, teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Banyumas apakah mereka sudah mematuhi Peraturan yang berlaku untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan yang sangat berharga. Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Khoirina Kencana Ningrum (2018) dalam penelitian ini juga menambahkan Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Sebagai variabel independen. Menurut latar belakang diatas, dijelaskan bahwa variabel dalam penelitian ini cukup menarik dan layak untuk dianalisis lebih lanjut. Maka dari itu judul yang diangkat adalah **"Pengaruh**

Sistem Informasi Akuntansi, Pemanfatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Banyumas."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dibahas rumusan masalah sebagai berikut :

a) Apakah Sistem Informasi Akuntansi (SIA) secara parsial mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Banyumas?
b) Apakah Pemanfaataan Teknologi Informasi secara parsial mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Banyumas?
c) Apakah Sistem Pengendalian Intern secara parsial mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Banyumas?
d) Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia secara parsial mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Banyumas?
e) Apakah Sistem Informasi Akuntansi (SIA), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan memperngaruhi Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

a) Untuk Menganalisis Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (SIA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Banyumas secara parsial.
b) Untuk Menganalisis Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Banyumas secara parsial.
c) Untuk Menganalisis Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Banyumas secara parsial.
d) Untuk Menganalisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Banyumas secara parsial.
e) Untuk Menganalisis Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (SIA), Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber

Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Banyumas secara simultan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan tentang kualitas laporan keuangan yang tidak terpaku pada teori namun juga dapat diterapkan.
2. Untuk meningkatkan kualitas kebijakan moneter, pemerintah baik pusat maupun daerah harus mencari SDM dengan kompetensi dan pemahaman agar dapat mengawasi kebijakan moneter.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa menganalisis faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.